

## Islamisme dalam Media Sosial (Studi Perlawanan ‘Kelompok Islam 212’ Terhadap Pemerintah Pada 2016-2019)

**Moch. Mubarak Muharam, Bambang Sigit Widodo\*, Wisnu**

Program Studi Ilmu Komunikasi, FISH, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya

Email penulis korespondensi: bambangsigit@unesa.ac.id

### ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisa perlawanan ‘Kelompok Islam 212’ terhadap pemerintah pada 2016-2019. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara secara mendalam terhadap 13 informan-yang berasal dari 4 unsur- dari ‘Kelompok Islam 212’, Kelompok Islam Moderat, Akademisi dan Jurnalis. Selain itu, juga menggunakan data sekunder seperti media dan buku. Studi in menyimpulkan bahwa teknologi informasi (media online dan medsos) mempunyai peran besar untuk membuat gerakan perlawanan ‘Kelompok Islam 212’ terhadap pemerintah pada 2016-2019 begitu menonjol. Gerakan perlawanan yang menonjol dapat dilihat pada Aksi Bela Islam (ABI) pada 2 Desember 2016. Walaupun negara berusaha menghalangi aksi tersebut, ABI tersebut berhasil mendatangkan beratus ribu peserta dari berbagai provinsi dan menjadi perhatian nasional dan internasional. Karena aksi tersebut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama menjadi tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.

**Kata-kata Kunci:** Kelompok Islam 212; Teknologi Informasi; Aksi Bela Islam

### ABSTRACT

*This study uses a qualitative approach by conducting in-depth interviews with 13 informants-coming from 4 elements- from the 'Islamic Group 212', Moderate Islamic Groups, Academics and Journalists. In addition, it also uses secondary data such as media and books. This study concludes that information technology (online media and social media) has played a major role in making the 'Islamic Group 212' resistance movement against the government in 2016-2019 so prominent. A prominent resistance movement can be seen at the Islamic Defending Action (ABI) on 2 December 2016. Even though the state tried to block the action, the ABI succeeded in bringing in hundreds of thousands of participants from various provinces and received national and international attention. Because of this action, DKI Jakarta Governor Basuki Tjahya Purnama has become a suspect in the alleged blasphemy case.*

**Keywords:** Islamic Group 212; Information Technology; Islamic Defense Action

**Korespondensi:** Bambang Sigit Widodo, Universitas Negeri Surabaya. 1. Lidah Wetan, Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur 60213. *Email:* bambangsigit@unesa.ac.id

## PENDAHULUAN

‘Kelompok Islam 212’ adalah kelompok Islamisme yang melakukan oposisi terhadap pemerintahan yang dipimpin Joko Widodo (Jokowi) pada 2016-2019. Kelompok tersebut secara aktif melakukan kritik terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, terutama melalui unjuk rasa. Pada awalnya kelompok tersebut terbentuk sebagai respon terhadap dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahya Purnama (Ahok) pada 2016, Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu. Ahok Dituduh telah melakukan penistaan terhadap Alqur’an, karena itu mereka menginginkan Ahok diturunkan sebagai gubernur dan mendapat hukuman penjara (M Mietzner, 2018).

Kekecewaan kelompok Islamisme terhadap Ahok, sebenarnya terjadi sebelum adanya dugaan penistaan agama. Mereka kecewa terhadap Ahok, karena beberapa penyebab, diantaranya, *pertama*, Ahok dianggap sebagai kepanjangan politik dari kepentingan politik Jokowi. Alasan tersebut dimunculkan, karena Ahok adalah wakil gubernur dari untuk Jokowi untuk periode 2012-2017. Setelah Jokowi terpilih sebagai presiden pada 2014, secara otomatis Ahok menggantikan Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta. *Kedua*, Kebijakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dinilai telah merugikan orang Islam. Ada beberapa kebijakan dari Ahok yang dianggap merugikan orang Islam, diantaranya adalah melarang takbiran Hari Raya dan pengajian di jalan raya serta kebijakan dianggap tidak menguntungkan bagi aktivitas organisasi Islam di Jakarta. Ahok diyakini oleh kelompok Islamisme telah melakukan penistaan agama, karena pernyataan di Kepulauan Seribu pada 27 Nopember 2016, yang menyatakan bahwa banyak orang Islam menggunakan Ayat Alqur’an untuk mendelegitimasi kepemimpinannya (Miichi, 2019).

Pernyataan Ahok, menjadi momentum bagi Kelompok Islamisme untuk melakukan demoralisasi terhadap kepemimpinan Ahok di Jakarta. Terjadi beberapa aksi jalanan dilakukan oleh kelompok Islamisme, diantara gerakan jalanan yang paling menjadi perhatian publik adalah aksi jalanan yang dilakukan pada 4 September dan 2 Desember 2016. Unjuk rasa yang, kemudian dikenal sebagai aksi 411 dan 212 tersebut, telah berhasil mendatangkan beratus ribu orang dari berbagai daerah di Indonesia untuk bersatu melakukan penuntutan terhadap Ahok. Aksi 212 bagi Kelompok Islamisme dianggap lebih mempunyai makna khusus dibandingkan aksi 414, karena beberapa hal. *Pertama*, aksi tersebut dihadiri oleh Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Kehadiran Presiden tersebut, menjadi sebagai penanda bahwa aksi tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja oleh pemerintah. Kehadiran presiden tersebut memberikan makna

bahwa aksi tersebut akan bisa mengganggu stabilitas sosial dan politik bila tidak diperhatikan secara serius oleh negara (*state*). *Kedua*, Aksi 212 dianggap lebih bernilai dibandingkan dengan aksi 411, karena setelah aksi tersebut Ahok dijadikan tersangka oleh negara (Marijan, 2016).

Setelah penetapan Ahok sebagai tersangka, tidak menjadikan kelompok Islamisme ('Kelompok Islam 212'), mengurangi aksi-aksi agama dan politik (M. M. Muharam et al., 2021). 'Kelompok Islam 212' secara aktif melakukan gerakan politik agar Ahok tidak terpilih kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta pada pemilihan gubernur (pilgub pada 2017). Sebagian dari kelompok mendukung Agus Harimurti Yudhoyono dalam pilgub tersebut dan sebagian besar dari mereka mendukung Anies Rasyid Bawesdan sebagai gubernur. Setelah pemilihan gubernur (pilgub) DKI berakhir dengan kemenangan pasangan Anies Rasyid Bawesdan-Sandiaga Uno, tidak dengan sendirinya menghentikan aksi-aksi politik 'Kelompok Islam 212'. Kelompok tersebut secara aktif melakukan unjuk rasa dan melakukan pengawalan di pengadilan agar Ahok dipenjarakan dengan secepatnya dan dihukum secara maksimal. Selain itu, kelompok tersebut melakukan aksi-aksi agama dan politik untuk mendelegitimasi kepemimpinan Jokowi sebagai presiden (Kusman, 2016). Kelompok tersebut berupaya agar Jokowi tidak terpilih lagi sebagai presiden pada Pemilihan presiden (pilpres) 2019. Jokowi sebagai petahana mencalonkan lagi sebagai presiden, dengan menjadikan Kyai Ma'ruf Amin sebagai cawapres. Ma'ruf Amin (MA) adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), pembuat fatwa MUI yang menyatakan Ahok melakukan dugaan penistaan agama. Dalam konteks tersebut MA adalah tokoh Islam yang berada dalam satu kubu dengan 'Kelompok Islam 212' dalam "kasus Ahok". Penunjukkan MA sebagai cawapres, menunjukkan bahwa Jokowi ingin mendapat dukungan dari orang Islam, termasuk sebagian dari tokoh 'Kelompok Islam 212'.

Walaupun Jokowi telah menunjuk Ma'ruf Amin (MA) sebagai cawapresnya, 'Kelompok Islam 212' tetap melakukan penolakan terhadap Jokowi untuk sebagai presiden lagi. Sebaliknya, kelompok tersebut mendukung pasangan Prabowo Subianto (PS)-Sandiaga Mien Uno (SMU) sebagai capres-cawapres. Dukungan terhadap pasangan PS-SMU, lebih disebabkan karena pasangan tersebut adalah kompetitor dari Jokowi dalam pilpres 2019. 'Kelompok Islam 212' secara aktif melakukan konsolidasi internal, unjuk rasa, ceramah agama di masjid dan musholla, termasuk menggunakan teknologi informasi (medsos dan media online) untuk menyebarkan pengaruh, mendapatkan simpatik dan memperoleh pendukung dalam pilpres 2019.

Teknologi informasi mempunyai peran besar bagi penguatan gerakan 'Kelompok Islam 212'. Tidak seperti dua organisasi masyarakat (ormas) Islam di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang mempunyai kepengurusan hingga tingkat kelurahan di

hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia, 'Kelompok Islam 212' yang dimotori oleh Front Pembela Islam (FPI) relatif tidak mempunyai kepengurusan hingga di tingkat kelurahan atau Kecamatan di seluruh Indonesia. Tetapi walaupun demikian, kelompok tersebut dapat memobilisasi beratus ribu orang untuk datang di aksi 411 dan 212, hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari kemampuan mereka untuk menggunakan medsos untuk memobilisasi massa dalam 2 aksi tersebut.

'Kelompok Islam 212' mempunyai banyak pendukung dari pemuda yang dapat mendayagunakan teknologi informasi untuk merealisasikan tujuan agama dan politik. Para pemuda tersebut kebanyakan adalah mahasiswa ataupun sarjana yang berasal dari jurusan eksakta. Diantara para pemuda yang melek teknologi yang mendukung dan bersimpati dengan 'Kelompok Islam 212' adalah berasal dari Hizhbut Tahrir Indonesia ataupun Jama'ah Tarbiyyah (PKS). Pemuda-pemuda tersebut selalu aktif memproduksi dan menyebarkan berita-berita yang mendukung eksistensi dari 'Kelompok Islam 212'. 'Kelompok Islam 212' adalah kelompok Islamisme yang melakukan perlawanan pada pemerintah pada 2016-2019. Kelompok Islamisme sendiri dapat kita pahami dalam perspektif (teori) Islamisme sebagai berikut. *Pertama*, kelompok Islamisme adalah pihak-pihak yang berpikir, bersikap melakukan tindakan-tindakan agama, sosial dan politik dalam perspektif Islam. Dalam pandangan Kelompok Islamisme hukum dan sistem pemerintahan tidak boleh berbeda dengan hukum Islam (Mandaville, 2007). Bagi mereka politik dan Islam bukanlah kutub yang terpisah, sebaliknya keduanya mempunyai keterkaitan yang erat. Kelompok Islamisme mempercayai bahwa hukum Islam adalah sebuah solusi bagi persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan, khususnya di negara-negara yang mayoritasnya adalah orang Islam (Eligur, 2010). Bagi penganutnya Islamisme diyakini sebagai *discourse* dan merupakan ideologi, yang berasal dari pembacaannya secara khusus (Baskan, s & Wright, 2011). Sebuah formasi diskursif yang menyatukan *discourse* dan praktek secara historis (Osella, F & Soares, 2010).

*Kedua*, pemahaman Islamisme akan selalu terkait dengan kesadaran tentang konteks sosial dan politik yang terjadi. Karena itu gerakan Islamisme di berbagai negara, mempunyai bentuk dan strategi yang berbeda-beda. Sebuah perbedaan yang ditransformasikan oleh keadaan budaya, ekonomi dan institusi politik ditempat mereka melakukan praktek keagamaan (Castells, 2010). Pemahaman terhadap Islamisme, tidak hanya terkait dengan kondisi Islam setempat, tetapi juga melibatkan kondisi politik yang lebih luas (Osella, F & Soares, 2010).

Islamisme menjadi identitas yang menyatukan banyak orang Islam untuk melakukan gerakan politik. Sebagai identitas politik, Islamisme merupakan perwujudan dari sebuah konstruksi sosial. Sebagai sebuah konstruksi, kesadaran Islamisme belum tentu sebagai sebuah

realitas sosial, tetapi bisa menjadi sebuah ilusi. Ilusi yang dipengaruhi oleh pemahaman dan kepentingan tertentu aktor ataupun institusi politik (Maher, 2015). Sebagai sebuah konstruksi, Islamisme seringkali mempersoalkan keadaan tertinggal yang terjadi pada dunia Islam dan dunia global/Kapitalisme. Ia juga seringkali mempertanyakan keberadaan negara bangsa, sebaliknya ada keinginan dari Islamisme untuk merubah *nation state* tersebut dengan prinsip dan norma yang lebih baru (Mandaville, 2007).

*Ketiga*, konteks kesejarahan Indonesia, gerakan Islamisme dapat dilihat jejaknya semenjak era kolonialisme. Perang Padri di Sumatra Barat menjadi simbol gerakan Islamisme yang mempertanyakan pemerintahan kolonial, yang dinilai kafir dan merugikan Islam (Wahid Institute Islam). Perang Padri dipimpin Imam Bonjol dan Bonjol sendiri adalah pemimpin gerakan yang sangat karismatik, yang dipengaruhi oleh ajaran Wahabi, sebuah ajaran yang menginginkan praktek agama dan negara sesuai dengan Alqur'an, Sunnah Nabi dan praktek dari 4 sahabat nabi (Khulafaur Rasyidin) (Hadiz, 2016).

Setelah era perjuangan fisik yang bersifat kedaerahan pada abad 18-an, Islamisme melanjutkan gerakannya menyebarkan pengaruh dan melakukan perlawanan terhadap penjajah melalui pendekatan yang lain, yaitu melalui jalur organisasi dan diplomasi, yang terjadi pada 19. Sarekat Islam (SI), adalah organisasi Islamisme pertama yang melopori perjuangan melalui jalur tersebut. Organisasi itu mempertanyakan ketidakadilan yang dilakukan oleh Belanda. Walaupun awal pendiriannya, ditujukan untuk memperjuangkan ekonomi pedagang Islam, dalam perkembangannya SI menjadi gerakan perlawanan terhadap penjajah.

Menjelang kemerdekaan 1945, gerakan Islamisme berlanjut dengan keinginan mendirikan negara Islam. Pada Sidang di BPUPKI, wakil-wakil dari kelompok Islam menginginkan Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Mereka ingin sila pertama dari dasar negara berbunyi "Kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", sebagai ganti dari Sila "Ketuhanan Yang Maha Esa". Tetapi keinginan tersebut tidak berhasil, karena pada 18 Agustus 1945 disepakati bahwa dasar negara adalah Pancasila. Kegagalan menjadikan Piagam Jakarta sebagai dasar negara tidak meyakinkan kelompok Islamisme untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam. Pada Sidang Konstitusi di era Demokrasi Parlementer, keinginan untuk mengganti Pancasila diperjuangkan secara terus-menerus selama 18 bulan. Sebaliknya, kelompok Nasionalisme menolak keinginan kelompok Islamisme, sehingga pada waktu itu sidang-sidang di Majelis Konstituante terjadi perdebatan panas. Karena kondisi tersebut, Presiden Sukarno akhirnya membubarkan Majelis Konstituante itu, pembubaran tersebut menandai berakhirnya Demokrasi Parlementer, dan kemudian diganti menjadi Demokrasi Terpimpin.

Perjuangan Islamisme tidak saja dilakukan melalui jalur parlemen (Konstituante), pada era Pemerintahan yang dipimpin Sukarno itu, perlawanan terhadap sistem politik yang ada dilakukan dengan jalur penggunaan senjata. Pada tahun 1949, DI/TII yang didirikan oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat melawan pemerintah, karena tidak dengan adanya perjanjian Renville pada 1948 (Formichi, 2015). Selain didukung oleh para gerilyawan perang kemerdekaan, DI/TII juga dibantu oleh para petani untuk mendirikan negara Islam (Buehler, 2009). Selain di Jawa Barat, perlawanan DI/TII juga dilakukan di Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Aceh. Perlawanan di Sulsel itu menyebabkan nilai-nilai Islamisme tumbuh subur dan menjadi identitas lokal bagi masyarakat Bugis. Sedangkan DI/TII di Aceh menginspirasi lahirnya Gerakan Aceh Merdeka (Mueller, 2012). Pemberontakan DI/TII di beberapa wilayah di Indonesia membenarkan apa yang dinyatakan oleh Mueller bahwa Islamisme selalu mempertanyakan praktek negara bangsa (*nation state*) yang sekuler (van Bruinessen, 2002).

Perjuangan Islamisme diteruskan lagi pada pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Suharto. Penguasa tidak saja meminggirkan Kelompok Islamisme, pemerintah bahkan tidak segan untuk menggunakan kekerasan, seperti terjadi pada Peristiwa Tanjung Periok Jakarta dan Talangsari Lampung. Pada era ini, ajaran Islamisme disebarkan secara hati-hati, tidak bersifat terbuka (Barton, 2009). Pada awal Orba, Natsir melalui organisasi Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) menyakini bahwa Islamisme harus disebarkan melalui masji-masjid di kampus besar. Ide tersebut kemudian, direalisasikan oleh Imaduddin Abdul Rahim, yang mendirikan Gerakan *Jami'ah Tarbiyyah*. Gerakan *Tarbiyyah* memperkenalkan ajaran Islamisme ke masjid di kampus-kampus ternama di Indonesia seperti ITB, IPB, UGM, UI dan Unair. Mereka merekrut para mahasiswa di kampus tersebut untuk menjadi kader-kader penyebar ajaran Islamisme di Indonesia. Setelah Pemerintahan Orba *collaps*, kader-kader tersebut mendirikan Partai Keadilan (Sejahtera).

Perubahan era dari Orde Baru (Orba) menjadi Reformasi, memberikan perbedaan luar biasa terhadap kelompok Islamisme. Keterbukaan dan demokratisasi sangat muncul di era ini (Marcus Mietzner & Muhtadi, 2020). Pada awal reformasi, beberapa aktivis Islamisme menyampaikan aspirasi ke parlemen agar Indonesia menjadi negara Islam. Terdapat anggota parlemen mendukungnya, tetapi mayoritas anggota parlemen menolak usulan tersebut. Pada era Reformasi ini, eksistensi kelompok Islamisme, khususnya Front Pembela Islam lebih mendapatkan simpati dari Pemerintahan yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY membeberikan kontribusi bagi penguatan kelembagaan dan finansial dari FPI. Penguatan itu yang membuat FPI menjadi lebih berdaya dan dapat melakukan kegiatan Islamisme.

Penguatan tersebut kemudian menjadi modal bagi FPI untuk melakukan mobilisasi politik ke anggota dan simpatisannya pada Aksi Belas Islam (ABI) 2016.

Pada prinsipnya ada 4 pilihan tujuan dari gerakan Islamisme di Indonesia. *Pertama*, terbentuk Sistem Khilafah, yaitu sistem pemerintahan Islam tunggal di dunia. *Kedua*, terbentuknya Negara Islam. *Ketiga*, penguasaan politik dan ekonomi oleh Islam di Indonesia. Keempat, berlakukannya Perda Syariah. Untuk saat ini Perda Syariah mulai diberlakukan di beberapa wilayah di Indonesia, seperti beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan, Pamekasan Madura, Aceh, dan sebagainya.

Penelitian ini menjadi penting dilakukan karena Gerakan Islamisme tidak akan bisa dihilangkan dalam kesejarahan Indonesia. Kelompok tersebut akan terus melakukan gerakannya, sering dengan kepercayaannya bahwa pemerintah yang memimpin negeri ini dianggap tidak berpihak pada kepentingan Islam. ‘Kelompok Islam 212’ adalah salah satu fenomena gerakan Islamisme yang menganggap bahwa pemerintah di tahun 2016-2019 tidak berpihak pada kepentingan Islam (Islamisme).

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini berbasis pada penelitian kualitatif. Karena itu, dalam penelitian ini peneliti adalah sebagai instrumen, yaitu melakukan melakukan pengumpulan data secara langsung. Studi ini bertujuan untuk melakukan analisa terhadap perlawanan yang dilakukan oleh ‘Kelompok Islam 212’ terhadap pemerintah pada 2016-2019. Perlawanan tersebut menjadi lebih kuat, karena adanya kemajuan teknologi informasi. Penelitian melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa informan.

Pengumpulan data pertama kali dilakukan dengan melalui teks-teks. Setelah itu pengumpulan data melalui observasi, dan wawancara mendalam.. Observasi dilakukan ceramah agama yang dilakukan oleh Bachtiar Natsir, Zaitun Rasmin, unjuk rasa-unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok tersebut serta acara Ijtima Ulama 4. Wawancara mendalam dilakukan terhadap beberapa beberapa tokoh ‘Kelompok Islam 212’, perwakilan Islam Moderat, jurnalis dan akademisi. Wawancara menggunakan pertanyaan yang sama pada setiap subyek. Pertanyaan tersebut adalah mengenai perlawanan ‘Kelompok Islam 212’. Pengumpulan data selesai bila data sudah mengalami titik jenuh. Artinya data yang terkumpul sudah diyakini sudah cukup untuk menjawab persoalan yang diajukan.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah ‘Kelompok Islam 212’, yang didalamnya mencakup FPI, MIUMI, Forum Umat Islam (FUI), HTI, Persaudaran Alumni 212 dan Wahdah Islamiyah, GNPF Ulama, GNFP MUI AQL. Organisasi-organisasi tersebut dipilih karena

terlibat aktif dalam ‘Kelompok Islam 212’. Selain itu, juga diteliti adalah tokoh dari NU (Islam Moderat, Aktivis media sosial, akademisi. Informan yang diteliti adalah pihak-pihak yang tepat mewakili ‘Kelompok Islam 212’ yaitu, Shobri Lubis (Pimpinan FPI)), Bachtiar Natsir (MIUMI), Zaitun Rasmin (Wahdah Islamiyah), Muhammad Al Khaththath (Forum Umat Islam. FUI), Yusuf Martak (GNPF Ulama), Haykal Hassan (GNPFMUI), Slamet Maarif (Persaudaran Alumni /PA212), Ismail Yusanto (mantan pimpinan HTI), Hermansyah (aktifis media sosial), Pemilih memilih individu-individu tersebut sebagai subyek penelitian karena para tokoh tersebut mewakili organisasi-organisasi dalam ‘Kelompok Islam 212’. Walaupun bukan tokoh utama, peneliti memilih Hermansyah sebagai informan penelitian karena mewakili aktivis pers dan media dari ‘Kelompok Islam 212. Peneliti juga memilih Ulil Abshar Abdallah sebagai informan, karena merupakan tokoh NU, Abdullah Ahmad Niam karena sebagai aktifis media online dari NU, Syaifudin Zuhri (Akademisi dari Muhammadiyah) dan M. Jacky Mubarak (akademisi dari NU).

Tehnik analisis ini dilakukan dengan menggunakan kategori-kategori terhadap data yang diperoleh, kemudian langkah berikutnya adalah melakukan display data. Dalam hal ini dianalisa formasi ‘Kelompok Islam 212’ dan penggunaan teknologi informasi oleh ‘Kelompok Islam 212’ Langkah-langkah penelitian adalah pertama-tama kami melakukan penelitian tekstual, yaitu meneliti tentang teks-teks yang berisi tentang ‘Kelompok Islam 212’. Penelitian ini adalah data awal sebelum peneliti melakukan wawancara dan melakukan observasi di lapangan. Langkah berikutnya adalah melakukan observasi dan wawancara mendalam dengan ‘Kelompok Islam 212’. Wawancara dilakukan secara berulang-berulang, setiap wawancara dilakukan dalam upaya melakukan pengulangan pertanyaan terhadap pertanyaan yang dimunculkan oleh sebelumnya. Hal ini perlu dilakukan dalam upaya untuk melakukan konfirmasi ulang terhadap pertanyaan yang sebelumnya dimunculkan oleh informan. Untuk memperkuat kualitas dari penelitian, maka diteliti pula pendapat dari *stakeholders* lainnya yang bersesuaian dengan masalah yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Formasi ‘Kelompok Islam 212’**

‘Kelompok Islamisme 212’ adalah wajah baru dari pengorganisasian dari organisasi-organisasi Islamisme di Indonesia. Sebelumnya adanya “Kasus Ahok”, organisasi-organisasi Islamisme relatif organisasi-organisasi tersebut sulit bisa bersatu dalam satu barisan untuk memperjuangkan kepentingan sama. Menurut Syaifudin Zuhri, akademisi yang merupakan kader Muhammadiyah bahwa adanya “Kasus Ahok” membuat mereka bersatu



menjadi kekuatan yang solid untuk merealisasikan tujuan, termasuk diantaranya mengartikulasikan kekecewaan terhadap Pemerintahan yang dipimpin oleh Jokowi (wawancara pada 26 September 2019 di Bekasi). ‘Kelompok Islam 212’ adalah kumpulan dari organisasi dan tokoh Islamisme yang bersatu untuk menuntut keadilan bagi Islam. Terdapat banyak organisasi Islam yang tergabung dalam organisasi tersebut, diantaranya, Front Pembela Islam (FPI), Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Forum Umat Islam (FUI), Hizbut Tharir Indonesia (HTI), dsb. Selain organisasi-organisasi tersebut banyak tokoh Islam yang tergabung dalam ‘Kelompok Islam 212’, seperti Abdullah Gymnastiar, Neno Warisman, Abdullah Hehamahua, dan sebagainya.

Front Pembela Islam (FPI) dan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) adalah dua organisasi utama dalam Gerakan Pengawal Pengawal fatwa (GNPF) MUI- organisasi y embrio dari ‘Kelompok Islam 212’. FPI dan MIUMI, seringkali tidak bisa bersatu, karena terdapat 2 perbedaan dari mereka. *Pertama*, latar belakang organisasi. FPI-dengan Rizieq Shihab sebagai tokoh utamanya adalah organisasi yang cenderung menyerupai Nahdlatul Ulama (NU) dalam kebiasaan beribadahnya. FPI mendukung ziarah kubur, kegiatan kubur dan mengadakan kegiatan bersholawat. Sebaliknya MIUMI, dengan Bachtiar Natsir sebagai aktor utamanya- secara ibadah lebih menyerupai Muhammadiyah.

*Kedua*, metode gerakan. FPI lebih cenderung menggunakan unjuk rasa, aksi jalan untuk memperjuangkan keinginannya, sedangkan MIUMI menggunakan pendekatan yang lebih berorientasi pada penguatan pikiran, seperti ceramah, seminar, simposium, untuk menyebarkan ajaran Islamisme. Karena itu MIUMI lebih dekat dengan pemuda yang berlatar belakang kampus, yang mempunyai kemampuan menggunakan teknologi informasi.

GNPF MUI memberikan mandat pada Shihab untuk menjadi penasehat dan Natsir sebagai ketua dalam organisasi tersebut. Shihab dan Natsir menjadi basis massa yang berbeda, bila Shihab berpengaruh terhadap kelompok miskin perkotaan, sedangkan Natsir lebih kuat pada Muslim Kelas menengah perkotaan. Ketika Aksi Bela Islam (ABI) atau yang dikenal sebagai aksi 414 dan 212, pengikut Shihab lebih militan, karena mereka adalah bagian yang merasa dimiskinkan oleh kebijakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Shihab dan Natsir tidak mendukung Jokowi-Ahok sejak pilgub 201 dan mereka memilih Prabowo dalam pilpres 2014 ketika bersaing dengan Jokowi.

Natsir tidak mendukung Ahok sebagai gubernur karena Ahok merupakan minoritas agama, apalagi berasal dari etnis minoritas. Karena pengaruh ajaran Wahabi, Natsir percaya bahwa pemimpin itu harus orang Islam, dalam upaya untuk mewujudkan masyarakat Islam. Karena itu, bagi Natsir wajib bagi orang Islam memilih pemimpin Islam. Sebelum di MIUMI, Natsir

adalah pendiri dari Ar-Rahman Qur'anic Learning (AQL). Untuk melebarkan pengaruh agamanya, Natsir bersama Zaitun Rasmin mendirikan MIUMI. Rasmin, sendiri adalah teman kuliah dari Natsir di Mekkah, dan tokoh utama dari Wahdah Islamiyah, sebuah organisasi Islamisme yang berpusat di Ujung Pandang, dan mempunyai cabang- cabang di banyak kota (wawancara terhadap Zaitun Rasmin pada 26 Maret 2019 di Jakarta). Di GNPF MUI, Rasmin juga merupakan tokoh penting dan menjadi wakil Ketua. Rasmin dan Natsir secara bersamaan menjadi Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada periode yang dipimpin Ma'ruf Amin (MA).

Selain Natsir, tokoh utama di GNPF MUI ('Kelompok Islam 212') adalah Rizieq Shihab. Shihab adalah simbol utama dari organisasi Front Pembela Islam (FPI). Sebelum era Pemerintahan Jokowi, FPI dianggap dekat dengan beberapa penguasa. Hal tersebut karena pada awal pendiriannya, FPI didukung oleh pejabat militer yang dekat Presiden Habibie. Pada era Pemerintahan Habibie, FPI mulai muncul eksistensinya. Puncak kejayaan FPI terjadi pada era Pemerintahan Jokowi. Pada periode itu negara memberikan dukungan luar biasa, untuk menguatkan kelembagaan dan keuangan organisasi tersebut (Burhani, 2014). Pada era Pemerintahan Jokowi, perlakuan negara terhadap FPI tidak sebaik pemerintahan sebelumnya, hal tersebut membuat FPI tidak senang terhadap Jokowi.

Setelah terjadi penguatan secara keuangan dan kelembagaan, Shihab telah berhasil melakukan pengkaderan terhadap generasi dibawahnya. Karena itu, lahirlah tokoh-tokoh baru di FPI, seperti Shobri Lubis, Munarman dan Slamet Maarif. Tokoh-tokoh baru tersebut, menjadi tokoh yang menonjol dan memberika "warna" dalam perjuangan yang dilakukan GNPF MUI. Selain itu, Lubis adalah Ketua FPI yang menggantikan Shihab, Munarman adalah mantan aktifis HAM dari YLBHI pada masa Orde Baru dan menjadi orang Kepercayaan Shihab dan Maarif adalah Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212. Maarif menjadi sumber pemberitaan bagi media massa, media sosial dan online, selama Aksi Bela Islam dan Pilpres 2019. Dia selalu mengkampanyekan tentang perlunya pelaksanaan nilai-nilai Islam dalam kehidupan publik (wawancara pada 28 Maret 2019). Selain Maarif, Haykal Hasan dan Yusuf Martak adalah tokoh dari 'Kelompok Islam 212', yang seringkali menjadi sumber berita di media massa. Keduanya bukan dari FPI, tapi kedekatannya dengan Shihab, menjadikannya tokoh yang diperhitungkan dalam 'Kelompok Islam 212'. Kedekatan Hasan dengan Tommy Suharto, menjadikannya sebagai orang yang dapat "mempertemukan" kepentingan Pihak Cendana dengan 'Kelompok Islam 212'. Sedangkan Martak karena kedekatannya dengan Shihab, akhirnya dijadikan sebagai Ketua GNPF Ulama-nama selanjutnya dari GNPF MUI- menggantikan Bachtiar Natsir (wawancara dengan Yusuf Martak pada 9 Mei 2019 di Jakarta)

Selain yang disebutkan diatas, terdapat 2 tokoh lain yang berpengaruh di ‘Kelompok Islam 212’, yaitu Abdul Rasyid (Pimpinan Perguruan Tinggi As Syafiiyah), Forum Umat Islam yang dipimpin oleh Al Khathath dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan Ismail Yusanto sebagai tokoh publiknya. Rasyid adalah tokoh senior di Kelompok Islamisme, semenjak Orde Baru, Rasyid telah dekat dengan keluarga Cendana. Untuk itu, Rasyid berfungsi menjadi “penyambung “pertemuan Prabowo Subianto dengan ‘Kelompok Islam 212’ Forum Umat Islam (FUI) adalah organisasi yang aktif memperjuangkan nilai-nilai Islamisme sebelum adanya Aksi Bela Islam (ABI) 2016. Karena itu, Al Khathath-sebagai tokoh FUI- mendapatkan peran yang penting di ‘Kelompok Islam 212’. Perannya menjadi semakin menonjol, karena dia dekat dengan Shihab, kepiawaiannya membuat ide dan wacana yang orsinil. Pada pilpres 2019, kiprahnya begitu menonjol dalam mendukung Prabowo Subianto. Pada pilpres tersebut, dia membuat Gerakan Subuh berjamaah dan Pancasila harus berdasarkan aturan Islam (wawancara terhadap Al Khathath pada 29 Maret 2019 di Jakarta).

Selain FUI, HTI adalah organisasi Islam yang aktif memperjuangkan Islamisme pada era Reformasi. Menurut Ismail Yusanto, tokoh HTI bahwa organisasinya secara konsisten menawarkan sistem Khilafah di Indonesia (wawancara pada 7 Oktober 2019 di Jakarta). Banyak pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam HTI mempunyai kemampuan menggunakan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Pemuda dan mahasiswa tersebut yang pada akhirnya aktif membentuk opini publik di media online dan medsos terkait Aksi Bela Islam (ABI), pilgub DKI 2017 dan pilpres 2019. Selain kader-kader HTI, anggota dari Jamaah Tarbiyah (PKS) juga secara aktif melakukan konstruksi publik di media online dan medsos tentang ABI dan kepentingan politik kelompok Islamisme.

### **Teknologi Informasi dan Islamisme**

Teknologi Informasi (media online dan medsos) telah memberikan pengaruh bagi terjadinya peristiwa penting yang melibatkan orang-orang Islam di beberapa negara pada 21. Peristiwa penting tersebut adalah Arab Spring, yaitu, gerakan politik yang dilakukan oleh rakyat untuk menjatuhkan penguasa di beberapa negara di Timur Tengah, seperti Mesir, Tunisia, dsb(Dunne, 2015). Akibat gerakan tersebut beberapa kepala negara harus turun dari jabatannya.

Peristiwa Arab Spring dapat terjadi dan menjadi perhatian seluruh dunia, tidak bisa dilepaskan adanya pengaruh dari *You Tube*, *Facebook*, keduanya adalah *channel* pemberitaan dari media sosial (medsos)(M. Muharam & Marijan, 2020) . Penggunaan medsos oleh pemuda untuk melakukan perlawanan terhadap penguasa telah mempengaruhi pemberontakan rakyat terhadap penguasanya di beberapa negara di Timur Tengah. Diawali dari Mohamed Bouazizi,

pemuda 26 tahun, yang melakukan pembakaran diri, sebagai bentuk protes terhadap adanya pungutan liar yang dilakukan oknum pemerintah. Pembakaran diri tersebut kemudian disebarluaskan melalui *You Tube* dan Televisi Al Jazeera dan dengan seketika rakyat Tunisia menjadi marah dan kemudian berhasil menjatuhkan Presiden Ben Ali dari jabatannya.

Peristiwa di Tunisia tersebut kemudian menular ke Mesir dan beberapa negara di Timur Tengah. Asma Mahfouz, mahasiswa berumur 26 tahun, dengan melalui *facebook* mengajak rakyat Mesir untuk melakukan revolusi sebagai bentuk protes terhadap kelaparan dan kemiskinan yang terjadi. Ajakan tersebut memicu revolusi rakyat, yang kemudian puncaknya, rakyat dapat menjatuhkan Presiden Husni Mubarak dari jabatannya sebagai orang nomor satu di Mesir. Pada akhirnya peristiwa di Tunisia dan Mesir juga terjadi di banyak negara yang mayoritas penduduknya adalah orang Islam di Timur Tengah.

Penggunaan teknologi informasi (media online dan medsos) juga menjadi salah satu penyebab 'Kelompok Islam 212' berhasil membuat gerakan Islamisme secara besar pada Aksi Bela Islam (ABI) pada 4 September (aksi 414) dan 2 Desember (aksi 212) 2016. Tanpa adanya media sosial (medsos), ABI, khusus aksi 212 tidak dapat menjadi perhatian publik secara nasional atau internasional. Beberapa minggu, sebelum Aksi 212, negara berupaya agar aksi tersebut tidak terlaksana secara sukses. Menurut Shobri Lubis, Ketua Front Pembela Islam (FPI) negara berupaya agar aksi tersebut tidak dihadiri oleh peserta dengan jumlah besar (wawancara pada 26 Maret 2019 di Bekasi). Menurut Yusuf Martak, Ketua GNPF Ulama menyatakan bahwa banyak cara yang dilakukan oleh negara untuk membuat aksi 212 tidak terlaksana secara baik, diantaranya negara mendatangi ormas dan tokoh Islam sebelum aksi 212, meminta pemilik armada transportasi (seperti bus) untuk tidak memberangkatkan peserta ke Jakarta (wawancara pada 9 Mei 2019 di Jakarta). Keaktifan negara untuk menghalangi aksi 212, menimbulkan kekhawatiran dari para tokoh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI terkait kesuksesan acara tersebut. Sebagaimana yang disampaikan Shobri Lubis sebagai berikut:

“kami sebenarnya sangat khawatir, apakah aksi tersebut akan sukses, karena melihat gerakan pemerintah yang secara gencar menghalangi Aksi Bela Islam itu. Tetapi Allah berkehendak-lain, yang diluar dugaan kami yaitu dengan adanya aksi jalan kaki yang warga Ciamis ke Jakarta dan aksi itu disebarluaskan melalui *You Tube*” (wawancara dilakukan pada 26 Maret 2019 di Bekasi).

Kegiatan dilakukan warga Ciamis Jawa Barat, dengan melakukan jalan kaki menuju Jakarta dalam upaya untuk mengikuti Aksi Bela Islam 3 (aksi 212) menjadi viral di seluruh Indonesia karena keaktifan dari simpatisan atau anggota dari 'Kelompok Islam 212'

menyebarkan secara terus-menerus melalui *You Tube*. Publikasi secara cepat ke masyarakat tersebut, menggugah kesadaran dari banyak orang Islam untuk hadir dan mensukseskan acara tersebut. Melalui *You Tube* dan *channel* media sosial lainnya, ditunjukkan bahwa selama proses perjalanannya ke Jakarta, pejalan-pejalan kaki dari Ciamis tersebut mendapat dukungan dari Gubernur Jawa Barat. ‘Kelompok Islam 212 secara aktif pula mendistribusikan berita dari medsos tentang dukungan luar biasa dari warga terhadap pejalan kaki Ciamis. Kelompok tersebut menunjukkan ke publik bahwa di setiap tempat yang dilewatinya, pejalan kaki Ciamis mendapat bantuan makanan dan minuman dari warga. Karena pemberitaan di medsos, akhirnya menggugah kesadaran dari warga di Jakarta untuk mendukung aksi 212 secara antusias. Haykal Hassan, Tokoh dari GNPF-MUI (‘Kelompok Islam 212’) menyatakan bahwa warga di Jakarta menyediakan tempat, makanan dan minuman bagi peserta dari yang mengikuti aksi 212 secara antusias dan sukarela (wawancara pada 21 Maret 2019 di Jakarta).

‘Kelompok Islam 212’ memahami dan menyadari bahwa teknologi informasi (media online dan medsos) dapat didayagunakan untuk membentuk pengaruh bagi kesuksesan aksi 212. Secara kelembagaan ataupun personal (inisiatif para tokohnya) ‘Kelompok Islam 212’ menggunakan medsos melalui beberapa *channel*, seperti *You Tube*, Facebook, Twitter, Instagram, Line dan What App menciptakan tagar # Aksi Bela Islam 3. Melalui tagar tersebut, ‘Kelompok Islam 212’ membikin konstruksi bahwa aksi mereka didukung oleh pejabat negara dan tokoh-tokoh Islam. Disebarkan pernyataan dari KH. Miftahul Akhyar bahwa “Ahok wajib ditahan sebelum demo 2 Desember” dan kemudian perkataan dari Wapres Yusuf Kalla yaitu “persilahkan demo 2 Desember”. Pernyataan 2 tokoh terkemuka tersebut dikonstruksi sebagai dukungan terhadap aksi 212. Adanya pernyataan tersebut, memungkinkan bagi ‘Kelompok Islam 212’ membentuk wacana bahwa aksi 212 adalah kegiatan mencari keadilan bagi umat Islam.

Kesadaran bahwa teknologi informasi adalah piranti penting untuk mensukseskan tujuan gerakan Islamisme, juga ditunjukkan oleh ‘Kelompok Islam 212’ dengan membentuk *Muslim Cyber Army*. Pasukan siber tersebut difungsikan untuk membuat dan menyebarkan narasi dan melakukan *counter* terhadap wacana dari pihak lain di media online atau medsos (teknologi informasi). Menurut Bachtiar Natsir, Ketua MIUMI yang sekaligus Ketua dari GNFP MUI, bahwa perebutan pengaruh di bidang agama dan politik tidak dipisahkan dari pertarungan di dunia maya. Natsir menyatakan sebagai berikut:

“Ini era perebutan dan penyebaran pengetahuan dan informasi melalui digital, maka diperlukan penyebaran ajaran-ajaran Islam melalui media sosial. Media sosial digunakan sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan Islam, bisa digunakan untuk

memajukan Islam. Sudah saatnya Islam memimpin dunia dan kebangkitan Islam bisa melalui Indonesia” (wawancara pada 28 Maret 2019 di Jakarta).

Media online dan medos difungsikan oleh ‘Kelompok Islam 212’ untuk membentuk pengaruh terhadap orang-orang Islam yang tidak terlalu mempunyai keterikatan emosi afliasi dengan Ormas Islam Moderat (Khususnya Nahdlatul Ulama/NU). Bagi Natsir, orang Islam dalam posisi tersebut dapat dipengaruhi untuk mendukung tujuan dari Islam (Islamisme) dan Natsir percaya bahwa salah salah bentuk kerja ideologis adalah meembentuk kesadaran orang Islam yang berposisi “bebas’ menjadi pendukung aksi 212. Selain mencari dukungan dari orang Islam dengan posisi tersebut, media online dan medsos digunakan untuk mendapatkan simpati dari “Kelompok Islam Mengambang”, yaitu orang Islam dari NU dan Muhammadiyah, tetapi tidak merasa perlu harus mematuhi instruksi dari organisasi tersebut dalam persoalan sosial dan politik (Hadiz, 2019).

Kesadaran untuk menggunakan teknologi informasi (media online dan medsos) untuk melakukan konstruksi sosial tentang Aksi Bela Islam (ABI), Pilgub DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019, tidak hanya dilakukan oleh tokoh dari GNPf MUI/GNPf Ulama- nama pengganti dari GNPf MUI-, tetapi juga dilakukan oleh simpatisan dari organisasi tersebut. Hermansyah, ahli teknologi dari GNPf MUI/GNPf Ulama (‘Kelompok Islam 212’) menyatakan bahwa orang Islam di luar struktur ‘Kelompok Islam 212’ membentuk dan menyebarkan narasi ke masyaraat bahkan ke luar Negeri untuk mendukung ABI (wawancara pada 25 Agustus 2019 di Bogor). Menurut Hermansyah, mereka juga membuat Whats APP (WA) Group untuk memperkuat perasaan solidaritas sebagai pejuang agama (*mujahadah*). Bagi mereka dengan menyebarkan narasi Islamisme ke publik, itu berarti mereka menjalankan fungsi sebagai pembela agama. Group-Group WA untuk mendukung aksi 212 itu juag dibentuk disetiap provinsi di Indonesia. Group-Group WaA tersebut dapat memperkuat komunitas *echo chamber*, yaitu komunitas yang pandangan tunggal dan tidak mempunyai lagi perspektif yang berbeda. Komunitas *echo chamber* bisa membentuk militansi perjuangan untuk membela pandangan Islamisme.

Militansi ‘Kelompok Islam 212’ dan simpatisannya dalam menggunakan teknologi informasi untuk mencapai tujuannya memang tidak bisa diragukan. Hal tersebut diakui oleh Abdullah Mukafi Niam, Pemred Media NU Online (situs resmi PBNU) bahwa kelompok Islamisme lebih aktif melakukan kampanye di media online dan medsos secara frontatif bahkan bisa menjurus pada hoax (wawancara, pada 26 Agustus 2019 di Jakarta). Keaktifan dari simpatisan, anggota dan pengurusnya membuat ‘Kelompok Islam 212’ menjadi dominan dalam dunia maya pada 2016-2019. Hasil Penelitian dari tim Cyber NU dan LTNU, lebih dari 200

website berafiliasi dan bersimpati dengan kelompok tersebut (suaraislam.com, 2017). Selain itu berdasarkan data yang dimiliki oleh Duta Islam.Com, terdapat 12 situs yang memberitakan tentang Islam, paling besar dan populer di halaman pertama google adalah situs yang berafiliasi dengan kelompok tersebut (Redaktur, 2018) dan 4 diantara 10 situs itu pernah diblokir Kominfo pada 2017, karena melakukan propaganda SARA, dan menyebarkan kebencian atas nama agama.

Ulil Abshar Abdallah, cendekiawan dari NU menyatakan bahwa wajar bila 'Kelompok Islam 212' aktif tampil di media online dan medsos, karena banyak dari kader dan simpatisan mereka, yang cakap dengan bidang teknologi dan sejak lebih dahulu beradaptasi dengan kemajuan teknologi dibandingkan dengan kader NU (wawancara pada 6 Mei 2019 di Bekasi). Karena itu Abdallah menyebutkan mereka sebagai natif dalam bidang teknologi, yaitu orang yang tumbuh dan besar dengan teknologi serta menjadikan ruang digital sebagai nafas hidupnya. Menurut M. Jacky Mubarak, akademis di Jakarta bahwa diantara simpatisan yang melek teknologi, kecenderungannya adalah berasal dari PKS dan HTI (wawancara pada 27 Agustus 2019 di Jakarta). Kader dari kedua organisasi tersebut, sebagian adalah mengenyam pendidikan di jurusan sains, teknik dan kedokteran dari kampus-kampus ternama di Indonesia (Hasan, 2019).

'Kelompok Islam 212' secara cerdas dan tepat menggunakan teknologi informasi (medsos), karena aksesnya yang cepat, dapat disebar dengan seketika, dapat menjangkau orang di seluruh nusantara serta tidak mudah untuk diintervensi oleh negara (Slama, 2018). Praktek penggunaan medsos tidak saja dilakukan di politik, tetapi juga dalam kehidupan yang lain di Indonesia (Crosswinds, 2001). Dalam konteks tersebut, medsos sebagai bagian dari kemajuan internet, menjadi ruang dan waktu untuk menyampaikan aspirasi ke publik dan penyampaian tersebut lebih sulit untuk dicegah oleh negara, dengan demikian medsos menjadi ruang publik yang tidak terbatas (Lievrouw, 2011). Dengan kelebihan sebagai media yang independen dan sulit bagi pemerintah untuk mengontrolnya, medsos menjadi medium penting untuk meyarakan ide atau nilai-nilai kebaikan, melakukan kritik, meyarakan kepentingan dan mengorganisir sumber daya dalam mencapai tujuan (Aspinall, 2015) Medsos dan internet menjadi tidak terpisahkan dari kehidupan publik, termasuk politik pada abad 21 ini.

## **SIMPULAN**

'Kelompok Islam 212' adalah kumpulan dari organisasi dan tokoh Islamisme yang melakukan perlawanan pada pemerintah pada 2016-2019. Pada awalnya, organisasi dan tokoh

Islamisme tidak bisa bersatu dalam satu barisan. Tetapi setelah adanya kasus dugaan penistaan yang dilakukan oleh meyang bernama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI atau yang dikenal dengans sebutan ‘Kelompok Islam 212’. ‘Kelompok Islam 212’ secara aktif melakukan perlawanan terhadap pemerintah pada 2016-2019. Tetapi perlawanan yang paling menonjol dilakukan pada akhir Desember 2016, yaitu dengan melakukan Aksi Bela Islam (ABI) pada 2 Desember 2016. Aksi itu, yang kemudian dikenal sebagai aksi 212, telah menjadi perbincangan nasional dan internasional. Beberapa hal yang membuat aksi tersebut diperhatikan banyak pihak. *Pertama* aksi tersebut dapat mendatangkan beratus ribu orang dari penjuru nusantara. *Kedua*, aksi tersebut dihadiri presiden, wapres, menteri, dsb. *Ketiga*. Aksi tersebut dapat membuat Gubernur Basuki Tjaya Purnama (Ahok) dijadikan tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.

Aksi 212 nyaris gagal terlaksana secara besar-besaran, karena adanya hadangan dari pemerintah. Tetapi karena adanya aksi jalan kaki warga Ciamis ke Jakarta, yang kemudi jalan kaki tersebut diviralkan melalui *You Tube* dan medsos lainnya, membuat aksi 212 dapat dilaksanakan dengan dihadiri oleh beratus ribu orang. Dalam hal itu, gerakan ‘Kelompok Islam 212’ dapat menonjol, karena adanya peran dari teknologi informasi (medsos). Medsos tidak hanya membuat ABI menjadi besar, tetapi juga menyebabkan gerakan perlawanan ‘Kelompok Islam 212’ terhadap pemerintah dalam pilgub DKI Jakarta 2017 dan pilpres 2019 menjadi kuat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E. (2015). Oligarchic Populism: Prabowo Subianto’s Challenge to Indonesian Democracy. *Indonesia*, 99(1), 1–28. <https://doi.org/10.1353/ind.2015.0002>
- Barton, G. (2009). Indonesia: Legitimacy, Secular Democracy in Indonesia. *Politics & Policy*, 6(1), 1–23.
- Baskan, s & Wright, S. (2011). Seeds of Change: Comparing State-Religion in Qatar and Saudi Arabia. *Pluto Journal*, 32(2), 1–12.
- Buehler, M. (2009). Islam and Democracy in Indonesia. *Insight Turkey Journal*, 11(4), 51–63.
- Burhani, A. (2014). The Reformasi ’98 and The Comparative Study of Popular. *Journal of Democracy*, 6(2), 199–215.
- Castells, S. (2010). *The Power of Identity*. Wiley-Blacwell.
- Crosswinds, A. T. A. C. in H. (2001). Radical Internet Use. In *Radical Media, Rebellious Communication and Social Media* (p. 202). Sage Publication.
- Dunne, M. (2015). After the Arab Spring Caught in History’ Crosswinds. *Journal of Democracy*, 11(3), 75–79.
- Eligur, B. (2010). *The Mobilization of Political Islam In Turkey*. Cambridge University Press.
- Formichi, C. (2015). (Re) Writing the History of Political Islam In Indonesia. *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 30(1), 105–140.
- Hadiz, V. R. (2016). *Islamic Populism in Indonesia And the Middle East*. Cambridge University Press.
- Hadiz, V. R. (2019). The “Floating” Ummah in the Fall of “Ahok” in Indonesia. *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 7(2), 271–290. <https://doi.org/10.1017/trn.2018.16>



- Hasan, N. (2019). The Making of Public Islam: Agency and Commodification on The Landscape of The Indonesian Public Sphere. *Count Islam Journal*, 15(5), 229–250.
- Kusman, A. P. (2016). Aksi Bela Islam, Populisme, Konservatif dan Kekuasaan Oligarki. *Jurnam Maari*, 10(3), 45.
- Lievrouw, L. (2011). *Alternative and Activist New Media*. Polity Press.
- Maher, S. (2015). *Salafi-Jihadisme The History of An Idea, Dissertation or Degree of Doctor of Philosophy in King London*. King London.
- Mandaville, P. (2007). *Global Political Islam*. Routledge.
- Marijan, K. (2016). *Setelah Aksi Superdamai 212*.
- Mietzner, M. (2018). Fighting Iliberalism with Iliberalism: Islamist Populism and Democratic Deconsolidation in Indonesia. *Pacific Affairs*, 91(2), 261–282.
- Mietzner, Marcus, & Muhtadi, B. (2020). The myth of pluralism: Nahdlatul Ulama and the politics of religious tolerance in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 42(1), 58–84. <https://doi.org/10.1355/cs42-1c>
- Miichi, K. (2019). Urban Sufi and Politics in Contemporary Indonesia: The Role of Dzikir Association in the anti- Ahok' Rallies. *South East Asia Research*, 27(5), 1–13.
- Mueller, D. (2012). The State and Religion. *Review of Social Economy Journal*, 71(1), 1–13.
- Muharam, M. M., Marijan, K., & Kusman, A. P. (2021). Power relation of the 212 Islamic Group and the government in the 2019 presidential election. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 34(3), 305. <https://doi.org/10.20473/mkp.v34i32021.305-316>
- Muharam, M., & Marijan, K. (2020). *Social Media and the 212 Islamic Movement*. 29. <https://doi.org/10.4108/eai.1-10-2019.2291677>
- Osella, F & Soares, B. (2010). *Islam, Politics, Antropology*. Wiley-Blacwell.
- Redaktur. (2018). *Media Islam Jihad Dikuasai Situs Islam Terbesar dan Terpopuler di Google*. DutaIslam.Com.
- Slama, M. (2018). *Practising Islam through social media in Indonesia*. 9811. <https://doi.org/10.1080/13639811.2018.1416798>
- van Bruinessen, M. (2002). Genealogies of Islamic radicalism in post-Suharto Indonesia. *South East Asia Research*, 10(2), 117–154. <https://doi.org/10.5367/000000002101297035>